

ABSTRAK

Segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban tersebut. Rumusan masalah yang penulis ambil yaitu Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembunuhan anak kandung dan Bagaimana hambatan-hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan anak kandung.

Metode penelitian ialah penelitian pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yuridis hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber data penelitian adalah metode Pengumpulan Data meliputi wawancara (lisan dan tertulis), observasi dan dokumentasi. Analisis data bersifat kualitatif yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan anak karena berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yakni asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Artinya Tindak Pidana pembunuhan terhadap anak kandung ini melanggar Undang-Undang khusus bukan lagi KUHP, yakni terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian hambatan dan solusinya, bahwa saksi Kasno yang melakukan hubungan badan dengan terdakwa belum ditangkap karena kabur, sehingga solusinya oleh penyidik dimasukkan daftar pencarian orang (DPO), adapun denda yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), oleh karena terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut, maka solusinya terdakwa harus menjalani pidana kurungan/penjara selama 7 (tujuh) tahun ditambah 1 (satu) bulan.

Kata kunci: Pembunuhan, Anak Kandung, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

All the crime effecting someone died must be enforced by the law. Homicide for the crime purpose, by design or not, is not right by the law. The law enforcement is one of human right form for the victim and giving the punishment for arsonist who has carried away the victim's right. A biological children homicide by his mother, Siti Ngapiyah, is a break action to Child Protection Laws. The formulation of the problem is How the enforcement of the criminal law toward the biological children homicide and How the reluctances and solutions in the enforcement of the criminal law toward the biological children homicide.

The research method is a research of empiric juridical approach. It is a juridical research viewed as the norm or *das sollen*, because in discussing the research problem uses the law materials of written and unwritten law; or premier and seconder law. Research data source is Collecting Data Method including interview (oral and written), observation and documentation. Analyzing data is qualitative which gives the meaning of data offered in sentences then concluded in order to answer the research problem of the biological children homicide case done by the accused.

Based on the research in Child Protection Laws, according to *lex specialis derogate legi generalis* principle is law principle consist of the meaning that the rule of the special law will rule out the rule of the general law. It is meant the homicide act toward the biological children collides the special law not in Criminal Code (KUHP), the accused collides article 80 verse (3) and (4) junto article 76 C Indonesian Republic Constitution number 35 in 2014 about The Change of Indonesian Republic Constitution number 2 in 2002 about ChildProtection. Then, the reluctances and solutions, that the witness Kasno who impregnated is not arrested yet because of run off, so the solution of the investigator, he is in wanted list, the fine should be paid by the accused is about Rp. 500.000.000,- (five hundreds millions rupiahs), because the accused can't be able to pay the fine, so she must be sentenced for 7 (seven) years 1 (one) month.

Keywords: Homicide, Biological Children, Child Protection